

POLA KOMUNIKASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

¹⁾Miftahul Ainur Latifah, ²⁾Paramitha Purwitasari, ³⁾Hasdi Syahid Kasim
 (1,2,3)Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara
 Email: miftahulainurlatifa@gmail.com

Abstrak

Kolaka Timur merupakan daerah rawan bencana banjir. Untuk mengurangi kejadian bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kolaka timur melakukan kegiatan mitigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Komunikasi BPBD Kolaka Timuur dalam mitigasi Bencana Banjir di Kolaka Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam Penelitian ini menggunakan teori mitigasi bencana *Laswell* dengan limat indikator. Komunikan, pesan, media, komunikator, dampak. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan pola komunikasi Organisasi BPBD Kolaka Timur adalah pola roda. Pola roda terlihat karena penerapan pola komunikasi terstruktur dan terkoordinir oleh BPBD Kolaka Timur. Pada saat mitigasi bencana, pola roda tampak pada koordinasi yang dilakukan BPB Kolaka Timur. Pada saat mitigasi bencana, pola roda digunakan juga dalam koordinasi dan komando serta briefing di BPBD Kolaka Timur. Penggunaan media WhatsApp memperkuat penggunaan pola roda. Seluruh stakeholder dapat berkomunikasi dengan semua unsur namun tetap berdasarkan struktur yang ada. Media menjadi informasi dalam menyampaikan bencana banjir.

Kata Kunci: Pola Komunikasi; Mitigasi Bencana; BPBD Kolaka Timur

Abstract

East Kolaka is an area prone to flood disasters. To reduce disaster incidents, the East Kolaka Regional Disaster Management Agency carries out mitigation activities. This research aims to determine the Communication Pattern of the East Kolaka BPBD in mitigating the Flood Disaster in East Kolaka. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection uses observation, interviews and documentation. This research uses Haddow's disaster mitigation theory with four indicators. Customer focus, leadership commitment, situational awareness, media partnership. The results of this research show that the communication pattern of the East Kolaka BPBD Organization is a wheel pattern. The wheel pattern is visible due to the implementation of a structured and coordinated communication pattern by the East Kolaka BPBD. During disaster mitigation, a wheel pattern can be seen in the coordination carried out by BPB East Kolaka. During disaster mitigation, the wheel pattern is also used in coordination and command as well as briefing at the East Kolaka BPBD. The use of WhatsApp media strengthens the use of the wheel pattern. All stakeholders can communicate with all elements but still based on the existing structure. The media provides information in conveying flood disasters.

Keywords: Communication Patterns; Disaster Mitigation; East Kolaka BPBD

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara mempunyai kerawanan tingkat bencana alam dan bencana sosial yang cukup tinggi (Hadi et al., 2019). Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain: berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi: konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Memahami dan merespon kondisi tersebut, berbagai tindakan disetiap wilayah dalam cakupan nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga pada tataran pemerintahan terbawah perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif dan langkah strategis dalam menghadapinya. Menurut Adhitya, Barry, dkk terdapat beberapa tahapan dan fase dalam pengelolaan bencana yakni: Tanggap darurat, kesiapsiagaan, mitigasi, pencegahan, rekonstruksi (pembangunan kembali), dan fase pemulihan (*recovery*). Tahapan tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 33 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap, meliputi: prabencana, saat bencana terjadi, dan pascabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan sekelompok orang yang berkompeten dalam hal tersebut (dalam hal ini pemerintah, BMKG, BNPB, dan masyarakat) (Puspitasari, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan mitigasi bencana tidak lepas dari proses komunikasi, alur komunikasi, media komunikasi, dan simbol komunikasi yang bermuara pada satu pokok bahasan yaitu komunikasi kebencanaan (Badri, 2018)

Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri begitu juga halnya suatu organisasi (Syahrudin et al., 2023). Dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil begitu pula sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya komunikasi, organisasi dapat macet atau berantakan (Syahrudin, 2020). Komunikasi dalam konteks dan perspektif *West & Turner* terkait komunikasi bencana, terbagi menjadi tujuh yakni: (1) Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri; (2) Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi antara dua orang yang berhadapan langsung; (3) Komunikasi kelompok merupakan komunikasi dengan sekelompok orang; (4) Komunikasi organisasi yaitu dengan lingkungan yang besar dan luas; (5) Komunikasi publik didefinisikan sebagai komunikasi kepada pendengar dalam jumlah yang besar; (6) Komunikasi massa yakni komunikasi kepada *audiens* dalam jumlah besar melalui media; (7) Komunikasi lintas budaya diartikan sebagai komunikasi antara orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda (West & Turner, 2017).

Tujuh konteks komunikasi tersebut membutuhkan manajemen dari pihak pemerintah terhadap masyarakat (publik) dan/atau sebaliknya, yang bermuara pada perumusan kebijakan dan pemetaan suatu kebijakan manajemen bencana yang akhirnya disebut dan dipahami sebagai manajemen komunikasi bencana sesuai dengan peraturan perundangan yakni: (1) Pra bencana meliputi (manajemen risiko bencana, sosialisasi pengurangan risiko bencana, mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan); (2) Saat bencana (manajemen kedaruratan, manajemen pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan perlindungan); terakhir (3) Pasca bencana melihat bagaimana (manajemen pemulihan, komunikasi yang berfokus pada pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi, berkenaan dengan perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor yang terdampak)

Pola komunikasi adalah cara seorang Individu atau kelompok berkomunikasi. Pola komunikasi yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana suatu kelompok atau individu berkomunikasi, berdasarkan teori-teori komunikasi tentang menyampaikan atau mempengaruhi pesan (Ananda et al., 2024). Pola komunikasi dilakukan oleh anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus siap pergi ke lapangan atau tempat kejadian

untuk meninjau suatu bencana, dan berkomunikasi dengan Aparat desa, Babinsa dan Masyarakat setempat menyebutkan yang terdapat bencana banjir seperti di Pombeyoha, dan Wungguloko, Anambada, sejumlah warga meminta bantuan kebutuhan pokok untuk warga di sejumlah wilayah yang terdampak banjir. Bantuan diserahkan untuk menyasar sejumlah desa di kecamatan Ladongi dan kecamatan Dangia, Kolaka Timur.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan garda terdepan dalam mengatasi penanggulangan/pencegahan bencana, menangani saat terjadi bencana dan melakukan tindakan pemulihan pasca terjadinya bencana disuatu daerah (Setiawan et al., 2021). khususnya di Kabupaten Kolaka Timur dalam kasus ini, memegang peran vital dalam suatu wilayah termasuk di kabupaten Kolaka Timur. Sehingga, memahami potensi bencana yang dapat terjadi kapan saja dan pentingnya peran komunikasi dalam penanganannya, semestinya pemerintah memiliki peran dan pola komunikasi yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang ditelaah dengan menggunakan deskriptif analisis, untuk memperoleh hasil secara mendalam dan menyeluruh mengenai pola komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kolaka Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada intepretasi dan konstruksi digunakan untuk melihat objek dan peneliti sebagai instrument kunci (Margono, 2014).

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai sasaran. Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian akan diamati dan diteliti. Subjek penelitian berpusat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kolaka Timur. Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Adapun jumlah informan sebanyak 5 terdiri dari Kepala Dinas BPBD serta 4 Pegawai BPBD.

Penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti disesuaikan dengan tujuan penelitian serta dianggap mampu memberikan data dan informasi yang diharapkan peneliti (Sugiyono, 2019).

HASIL PENELITIAN

BPBD Kolaka Timur harus terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap strategi komunikasi mereka untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul. Ini termasuk mengatasi perubahan kondisi bencana, memperbarui teknologi komunikasi, dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, pola komunikasi yang diterapkan akan tetap relevan dan efektif dalam mengurangi dampak bencana.

Penerapan teori pola komunikasi organisasi *Lasswell* (1948) dalam pola komunikasi BPBD Kolaka Timur merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana. Melalui pemahaman dan penerapan keempat aspek komunikasi fokus, kepemimpinan, situasional, dan media—BPBD dapat mengoptimalkan upaya mitigasi dan memastikan bahwa masyarakat Kolaka Timur mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu dalam menghadapi berbagai bencana.

1. Komunikator

Komunikator di BPBD adalah individu atau kelompok yang menyampaikan informasi terkait bencana, seperti peringatan dini, rencana tanggap darurat, dan instruksi kepada masyarakat atau anggota tim. Ini bisa termasuk kepala BPBD, juru bicara, atau petugas

komunikasi. Pengumpul dan Penyebar Informasi Mereka juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber (seperti laporan lapangan atau data cuaca) dan menyebarkannya kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga bantuan.

Dalam konteks Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan relawan dalam situasi bencana disampaikan dengan efektif. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang jenis informasi yang diperlukan oleh setiap kelompok, baik itu warga yang terdampak bencana maupun relawan yang terlibat dalam proses penanggulangan. BPBD harus secara aktif berkomunikasi dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan informasi mereka, seperti detail tentang evakuasi, lokasi tempat penampungan, dan bantuan yang tersedia. Dengan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan pelanggan, BPBD dapat mengidentifikasi prioritas informasi yang paling relevan dan penting untuk disampaikan, sehingga memastikan bahwa semua pihak mendapatkan informasi yang mereka perlukan untuk mengambil tindakan yang tepat.

BPBD Kolaka Timur harus membangun mekanisme komunikasi yang efektif yang menjamin informasi disampaikan secara tepat dan akurat. Ini melibatkan pengembangan sistem komunikasi yang responsif dan efisien, termasuk penggunaan teknologi modern seperti menghubungi kontak darurat dan media sosial. Mekanisme ini harus dirancang untuk mengatasi tantangan dalam penyampaian informasi, seperti tingkat pendidikan, dan aksesibilitas teknologi. Selain itu, BPBD perlu memastikan adanya saluran feedback yang memungkinkan masyarakat dan relawan memberikan umpan balik tentang kualitas dan keakuratan informasi yang diterima. Dengan cara ini, BPBD dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan komunikasi dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan semua pihak yang terlibat.

2. **Pesan (*says what*)**

Dalam konteks BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), pola komunikasi merujuk pada cara informasi disebarluaskan dan dipertukarkan di dalam organisasi serta dengan pihak luar selama situasi bencana. Berikut adalah penjelasan tentang pola komunikasi BPBD, termasuk bagaimana pesan disampaikan dan dikelola. BPBD biasanya memiliki pusat komunikasi atau tim komunikasi krisis yang bertugas untuk mengelola semua alur informasi. Ini termasuk menerima laporan dari lapangan, menyusun pesan, dan menyebarkannya melalui berbagai saluran. Informasi mengalir dari tingkat atas (seperti kepala BPBD) ke bawah (seperti petugas lapangan) dan sebaliknya. Ini mencakup instruksi, laporan situasi, dan umpan balik tentang pelaksanaan tindakan tanggap darurat. Komunikasi Horizontal Terjadi antara berbagai unit atau departemen dalam BPBD. Ini membantu memastikan bahwa semua bagian organisasi memiliki informasi yang konsisten dan dapat bekerja sama dengan efektif. Komunikasi Diagonal Menghubungkan berbagai tingkat dan departemen yang mungkin tidak langsung berhubungan. Misalnya, informasi dari tim lapangan mungkin perlu disampaikan langsung ke mitra eksternal tanpa melalui semua lapisan manajerial.

3. **Media (*in which channel*)**

Media memainkan peran integral dalam pola komunikasi BPBD, menyediakan saluran utama untuk menyebarkan informasi tentang bencana dan tanggap darurat. Media sosial, siaran radio dan televisi, serta website resmi semuanya digunakan untuk menyampaikan peringatan dini, pembaruan situasi, dan instruksi tanggap darurat. BPBD harus memastikan bahwa mereka berkoordinasi dengan media secara efektif, mengelola informasi yang disebarluaskan, dan menangani tantangan yang muncul untuk memastikan komunikasi yang jelas dan efektif selama bencana.

BPBD menggunakan berbagai saluran komunikasi media sosial, siaran radio, televisi, sistem peringatan darurat, konferensi pers, dan website resmi untuk memastikan bahwa informasi bencana dan tanggap darurat disebarluaskan secara efektif. Setiap saluran memiliki fungsi dan keuntungan khusus, berkontribusi pada jangkauan yang luas dan penyampaian informasi yang tepat waktu, serta membantu dalam koordinasi respons bencana dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat

4. **Komunikasikan (*To Whom*)**

Pola komunikasi internal di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) umumnya mencakup berbagai aspek yang mendukung efektivitas organisasi dalam menangani situasi bencana. Berikut adalah penjelasan tentang pola komunikasi internal BPBD. Hierarki Komunikasi BPBD biasanya memiliki struktur hierarki yang jelas, di mana komunikasi dilakukan dari atas ke Bawah: Informasi dari pimpinan, seperti kebijakan, instruksi, dan keputusan strategis, disampaikan kepada staf dan tim di lapangan. Ini bisa berupa memo, surat edaran, atau pertemuan rutin. Bawah ke Atas: Informasi dari staf di lapangan atau laporan mengenai situasi bencana dikirimkan ke pimpinan untuk pengambilan keputusan. Ini mencakup laporan situasi, data darurat, dan rekomendasi.

Pihak BPBD Kolaka Timur menunjukkan komitmen dan pendekatan sistematis dalam menangani situasi yang melibatkan masyarakat terdampak. Dengan memberikan perhatian khusus dan mengumpulkan informasi tentang kondisi masyarakat, pihak BPBD berusaha memastikan bahwa intervensi yang dilakukan akan tepat sasaran dan efektif. Proses ini penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan situasi nyata di lapangan.

Komunikasi juga terjadi secara horizontal antara berbagai departemen atau unit di BPBD. Ini penting untuk koordinasi dan kolaborasi antar unit dalam merespons bencana. Koordinasi tim di lapangan berkomunikasi dengan tim perencanaan, logistik, dan manajer krisis untuk memastikan bahwa semua aspek penanggulangan bencana terkoordinasi dengan baik. Pertukaran Informasi: Berbagai unit berbagi informasi dan update situasi untuk memastikan konsistensi dan akurasi dalam penanganan bencana. Komunikasi Formal dan Informal, Formal: Meliputi rapat resmi, laporan tertulis, dan dokumen kebijakan. Rapat reguler dan briefing sering dilakukan untuk memastikan semua anggota tim mendapatkan informasi terkini dan instruksi yang jelas. Informal: Kadang-kadang, komunikasi informal seperti percakapan sehari-hari atau grup chat juga digunakan untuk penyampaian informasi cepat dan koordinasi informal di antara staf. Secara keseluruhan, penjelasan ini menunjukkan bahwa BPBD memiliki sistem komunikasi yang terstruktur dan dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi situasi darurat. Protokol komunikasi yang jelas, saluran khusus, tim yang terlatih, dan latihan rutin semuanya berkontribusi pada kemampuan BPBD untuk menangani krisis secara efektif.

5. **Dampak (*Whit What Effect*)**

Pola komunikasi organisasi di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) memiliki berbagai dampak signifikan pada efektivitas operasional dan respon terhadap bencana. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak dari pola komunikasi yang diterapkan di BPBD.

Dampak Pola komunikasi yang terstruktur dan terorganisir memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara pimpinan, staf, dan tim lapangan. Ini membantu memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam penanganan bencana memiliki informasi yang sama dan dapat bekerja dengan tujuan yang selaras. Contoh : Dengan adanya saluran komunikasi darurat dan protokol yang jelas, tim lapangan dapat dengan cepat berkoordinasi dengan pusat komando untuk merespons situasi darurat secara efektif.

Hasil keseluruhan peneliti dalam mengamati Pola komunikasi yang diterapkan di BPBD memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas operasional selama situasi bencana. Melalui saluran komunikasi formal, protokol darurat, dan simulasi rutin, BPBD dapat meningkatkan koordinasi, mengurangi kebingungan, dan memastikan respons yang cepat dan efisien. Dampak positif dari pola komunikasi ini mencakup pengurangan risiko kesalahan, peningkatan kepuasan stakeholder, dan pengelolaan stres di antara staf, yang semuanya berkontribusi pada penanganan bencana yang lebih baik.

SIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan teori pola komunikasi roda, berikut adalah kesimpulan dari pola komunikasi BPBD di Kolaka Timur: Struktur Komunikasi Terpusat Pusat Komunikasi: Pimpinan BPBD di Kolaka Timur berfungsi sebagai pusat komunikasi utama. Instruksi, kebijakan, dan keputusan strategis dari pimpinan disampaikan kepada staf melalui saluran resmi seperti memo, surat edaran, dan rapat koordinasi. Ini mencerminkan pola komunikasi roda di mana pimpinan menjadi titik pusat dari aliran informasi. Saluran Resmi: Dokumen tertulis dan rapat menjadi saluran utama untuk mendistribusikan informasi dari pimpinan ke seluruh staf. Semua komunikasi formal dan instruksi penting dikirimkan melalui saluran ini. Aliran Informasi Satu Arah: Dari Pimpinan ke Staf: Dalam pola komunikasi roda, informasi umumnya mengalir dari pusat ke anggota tim. Di BPBD Kolaka Timur, pimpinan mengirimkan instruksi dan kebijakan kepada staf, yang kemudian melaksanakan perintah berdasarkan informasi yang diterima. Pola ini mendukung pengelolaan bencana yang terorganisir dengan baik, meskipun penting untuk memastikan bahwa saluran feedback tetap efektif untuk meningkatkan respons dan adaptasi terhadap situasi yang berubah. Dalam pola komunikasi BPBD di Kolaka Timur yang mengikuti model komunikasi roda, pimpinan sebagai pusat komunikasi mengelola aliran informasi melalui saluran resmi dan darurat kepada seluruh anggota tim. Mengacu pada teori Lasswell, komunikasi ini mencakup siapa yang mengirimkan pesan (pimpinan), apa yang dikatakan (instruksi dan kebijakan), melalui saluran apa (memo, rapat, saluran darurat), kepada siapa (staf dan tim), dan dampaknya (koordinasi efektif, pengurangan kebingungan, respons cepat, dan peningkatan kepercayaan). Model ini memastikan bahwa informasi disampaikan dengan jelas dan efektif, meskipun komunikasi dua arah mungkin terbatas, dan feedback dari staf biasanya kembali melalui saluran formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Suyuti, N., & Basri, E. (2024). *POLA KOMUNIKASI SISWA SUKU BUGIS DENGAN SUKU BALI*. 2(2), 217–222.
- Badri, M. (2018). *PASCA BENCANA*. 29(1), 66–80.
- Hadi, H., Agustina, S., & Subhani, A. (2019). *PENGUATAN KESIAPSIAGAAN STAKEHOLDER DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA GEMPABUMI*. 3(1), 30–40.
- Margono. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan*.
- Puspitasari, D. (2014). *TINGKAT PENGETAHUAN SISWA KELAS VII DALAM MITIGASI BENCANA GEMPA BUMI DI SMP NEGERI 1 PRAMBANAN*.
- Setiawan, A., Saputra, H. A., Atmojo, M. E., Pemerintahan, M. I., & Yogyakarta, U. M. (2021). *EFEKTIVITAS PENYEBARAN INFORMASI COVID-19 MELALUI MEDIA TWITTER KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DAN*. 4, 89–106.
- Sugiyono. (2019). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Syahrudin. (2020). *PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ANTARPRIBADI MAHASISWA*. *Ilmu Komunikasi*.

Syahrudin, Menungsa, Abdul Sarlan, Mahdar, Amsurti, & Muslan. (2023). *fenomena komunikasi di era virtualisasi*. CV. GREEN PUBLISHER INDONESIA.